

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada kehidupan sehari-hari, manusia tidak bisa lepas dari kebutuhan akan uang. Uang digunakan sebagai alat untuk memperlancar aktivitas ekonomi yang mendominasi kegiatan sehari-hari. Kegiatan ekonomi merupakan aspek penting bagi perekonomian suatu negara, sehingga uang dapat dianggap sebagai jantung perekonomian itu sendiri. Mengacu pada pentingnya peran uang dalam perekonomian, maka jumlah uang yang beredar di masyarakat harus seimbang di mana jumlah uang yang disediakan oleh Bank Sentral harus sama dengan jumlah uang yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Bank Indonesia, sebagai penjaga stabilitas ekonomi Indonesia, mengadopsi pendekatan yang komprehensif dalam mengelola kebijakan moneter yang melibatkan pengaturan likuiditas, nilai tukar, suku bunga, dan jumlah uang beredar. Stabilitas ekonomi merupakan faktor kunci bagi pertumbuhan dan kesejahteraan suatu negara. Salah satu elemen penting untuk menunjukkan angka stabilitas ekonomi adalah pengelolaan jumlah uang beredar yang tepat. Dalam memantau likuiditas, Bank Sentral memastikan bahwa jumlah uang yang beredar dikendalikan dengan cermat untuk mencegah terjadinya inflasi yang merugikan. Selain itu, Bank Sentral juga berupaya keras untuk meminimalkan pelemahan nilai tukar rupiah dengan menjaga agar selisih suku bunga acuan Indonesia dan *The Fed* tetap minimal, mengakui dampak langsungnya terhadap stabilitas nilai tukar dan kesehatan ekonomi nasional. Sementara itu dalam mengelola suku bunga, Bank Indonesia menetapkan suku bunga acuan dengan rentang tertentu ($3,0 \pm 1\%$) dengan tujuan utama menjaga stabilitas inflasi inti dalam perekonomian. Semua langkah ini mencerminkan komitmen Bank Sentral dalam memperhatikan hubungan yang kompleks antara suku bunga, inflasi, nilai tukar, PDB, dan jumlah uang beredar untuk memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi Indonesia (Adam et al., 2023).

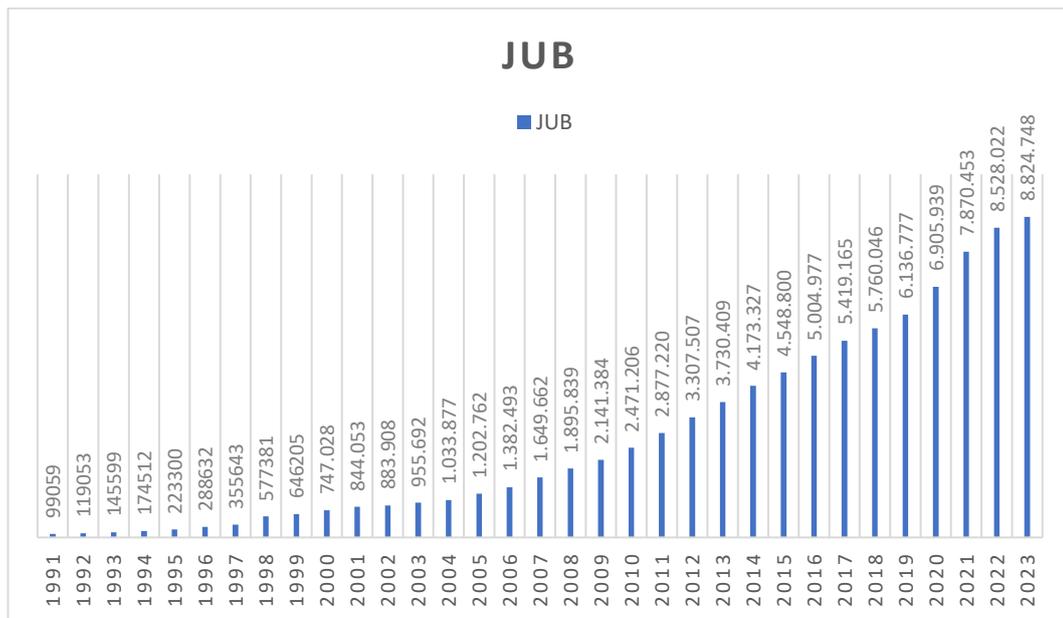
Jumlah uang beredar yang berlebihan dalam perekonomian suatu negara akan dapat memberikan tekanan pada nilai tukar mata uangnya terhadap mata uang asing. Naiknya penawaran uang atau jumlah uang beredar akan menaikkan harga barang yang diukur dengan *term of money* sekaligus akan menaikkan harga valuta asing yang diukur dengan mata uang domestik. Ini menunjukkan bahwa kelebihan pasokan uang juga dapat memicu inflasi domestik yang tinggi, sehingga memperlambat daya beli mata uang domestik terhadap barang-barang dan mata uang asing. Oleh karena itu, pengendalian jumlah uang beredar menjadi sangat krusial bagi otoritas moneter untuk menjaga stabilitas harga, nilai tukar yang kompetitif, dan iklim investasi yang kondusif. Hanya dengan mengelola jumlah uang beredar secara cermat, negara dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan dan kemakmuran jangka panjang.

Menurut Bank Indonesia (2021) uang beredar mewakili tanggung jawab sistem keuangan (Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat/BPR) terhadap sektor swasta nasional (tidak termasuk pemerintah pusat dan entitas asing). Dalam kerangka uang beredar terdapat berbagai elemen seperti mata uang yang dimiliki oleh publik (tidak termasuk Bank Umum dan BPR) uang simpanan dan uang semu yang dimiliki oleh sektor swasta nasional dan sekuritas non-ekuitas yang diterbitkan oleh sistem keuangan dan dipegang oleh sektor swasta nasional dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun.

Jika jumlah uang yang beredar melebihi permintaan masyarakat baik dalam hal suku bunga, harga atau pendapatan efek inflasi akan terjadi. Situasi ini dapat secara signifikan mempengaruhi stabilitas harga dalam suatu negara. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah atau otoritas moneter untuk terlibat dalam inisiatif yang bertujuan mengelola jumlah uang beredar melalui implementasi kebijakan moneter.

Bank Sentral sebagai otoritas moneter dapat menentukan jumlah uang yang tepat untuk dicetak dan diedarkan ke masyarakat. Dalam meningkatkan pertumbuhan disuatu negara diperlukan adanya beberapa kebijakan dan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat memacu adanya perkembangan uang

di negara tersebut khususnya di Indonesia. Perkembangan uang yang beredar di masyarakat tentu saja mengalami penurunan atau kenaikan setiap tahun. Semakin banyaknya uang yang beredar di masyarakat akan mempengaruhi beberapa faktor ekonomi seperti suku bunga, inflasi, nilai tukar dan PDB.

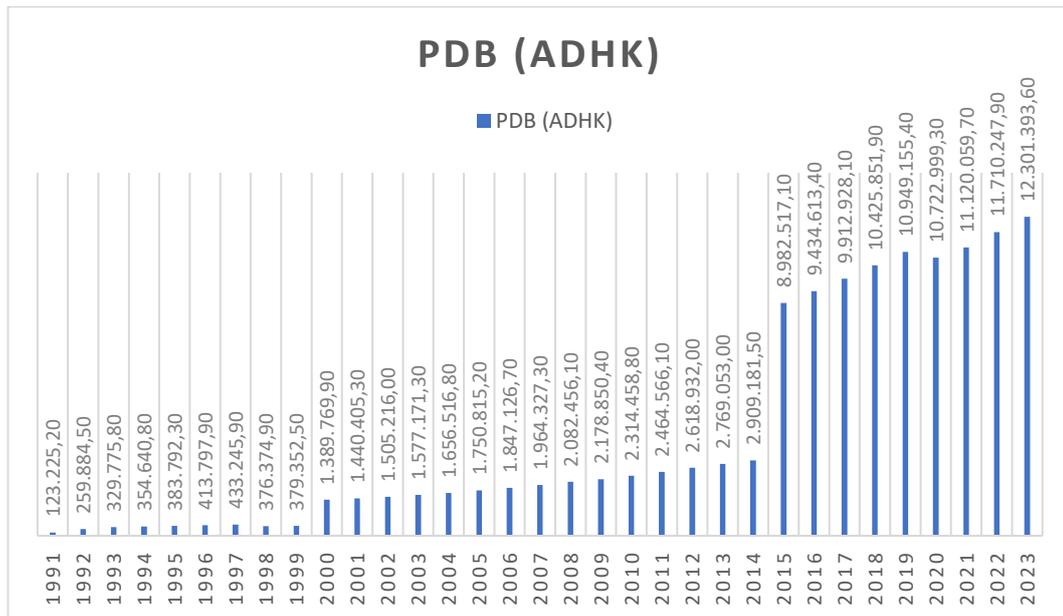


Gambar 1. 1 Jumlah Uang Beredar Tahun 1991 – 2023
Sumber: BPS, Uang Beredar (Rupiah), Juni 2024

Pada gambar 1.1 menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah uang beredar dimana pertumbuhan jumlah uang beredar (M2) di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh perkembangan suku bunga, inflasi, nilai tukar, dan PDB yang mengalami fluktuasi. Dapat dilihat pada Tabel 1.1 jumlah uang beredar di Indonesia mengalami tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan dinamika kebijakan moneter nasional. Pada tahun 1991, jumlah uang beredar tercatat sebesar Rp 99.059 miliar, mencerminkan kondisi perekonomian yang masih dalam tahap awal pembangunan dan stabilitas. Selanjutnya, tahun 1995 menunjukkan kenaikan signifikan menjadi Rp 223.300 miliar, seiring meningkatnya aktivitas sektor riil dan investasi.

Namun, pada tahun 1998, Indonesia dilanda krisis moneter yang menyebabkan berbagai indikator ekonomi terguncang. Meskipun demikian, jumlah uang beredar justru meningkat menjadi Rp 577.381 miliar, sebagai dampak dari kebijakan moneter longgar untuk memulihkan stabilitas ekonomi. Hingga tahun 2000, nilai M2 naik lebih lanjut menjadi Rp747.028 miliar, menandakan awal dari proses pemulihan nasional pascakrisis.

Pada tahun 2005, jumlah uang beredar sudah mencapai Rp1.202.762 miliar, dan naik menjadi Rp 1.895.839 miliar di tahun 2008, yang merupakan masa sebelum terjadinya krisis keuangan global. Kendati terjadi tekanan global, pada tahun 2010 jumlah uang beredar tetap meningkat hingga mencapai Rp 2.471.206 miliar, menunjukkan resiliensi ekonomi Indonesia terhadap gejolak eksternal. Tahun 2015 mencatat jumlah uang beredar sebesar Rp4.548.800 miliar, dan terus bertambah menjadi Rp 5.760.046 miliar pada tahun 2016. Pertumbuhan ini mencerminkan meningkatnya kebutuhan likuiditas seiring pertumbuhan konsumsi dan investasi domestik. Pada tahun 2020, sebagai dampak dari pandemi COVID-19 dan respons kebijakan fiskal serta moneter, jumlah uang beredar melonjak hingga Rp 6.905.939 miliar. Pemulihan ekonomi yang terjadi setelah pandemi mendorong pertumbuhan lebih lanjut, di mana jumlah uang beredar mencapai Rp 7.870.453 miliar pada tahun 2021, dan meningkat menjadi Rp 8.824.748 miliar pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan optimisme pasar, meningkatnya konsumsi rumah tangga, dan berlanjutnya pelonggaran kebijakan moneter yang mendukung pemulihan ekonomi nasional.

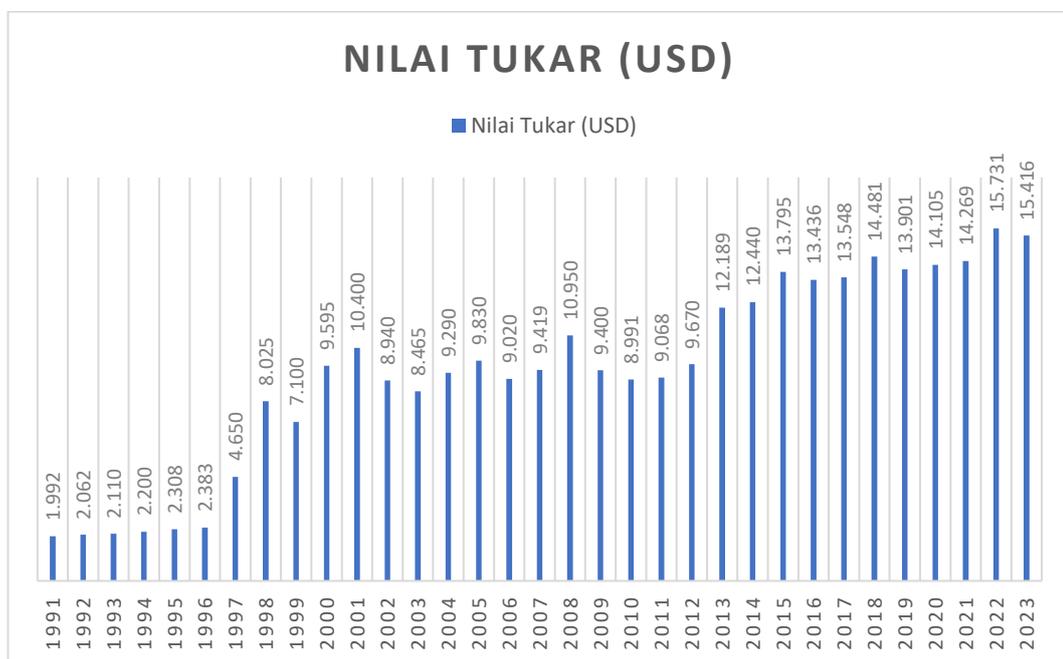


Gambar 1. 2 Produk Domestik Bruto (ADHK) Tahun 1991- 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) (2023), diolah

Produk domestik bruto (PDB) berpengaruh signifikan terhadap jumlah uang beredar di suatu negara. Ketika PDB meningkat, Bank Sentral biasanya meningkatkan jumlah uang beredar untuk mendukung aktivitas ekonomi. Sebaliknya, saat PDB menurun, Bank Sentral melonggarkan kebijakan moneter dengan menambah pasokan uang guna menstimulasi perekonomian. Dalam kondisi resesi, Bank Sentral memperlonggar kebijakan moneter dengan meningkatkan likuiditas untuk mendukung pemulihan ekonomi (Fajri et al., 2021). Perkembangan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDB ADHK) di Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun, meskipun sempat mengalami tekanan akibat berbagai krisis ekonomi. Pada tahun 1991, nilai PDB ADHK tercatat sebesar Rp123.225,20 miliar dan mengalami perlambatan signifikan pada tahun 1998 akibat krisis moneter, dengan nilai sebesar Rp 376.374,90 miliar. Pada tahun 2005, dengan PDB sebesar Rp 175.0815,20 miliar, menandai awal kebangkitan ekonomi di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan tren yang stabil dan mencapai angka Rp 2.314.458,80 miliar pada 2010, menandakan bahwa negara ini berhasil melewati tantangan krisis keuangan global dengan langkah-langkah pemulihan

yang tepat. Namun, tonggak sejarah sesungguhnya terjadi pada 2015, ketika PDB Indonesia melonjak drastis menjadi Rp 8.982.517 miliar. Angka angka tersebut mencerminkan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang luar biasa didorong oleh berbagai faktor pendukung seperti peningkatan investasi dan ekspor. Bahkan ketika dunia dilanda pandemi COVID-19 pada 2020, Indonesia mampu mempertahankan momentum positif dengan PDB yang terus meningkat menjadi Rp 10.722.999 miliar, berkat kebijakan stimulus ekonomi yang besar dan kemampuan beradaptasi dengan kondisi baru.

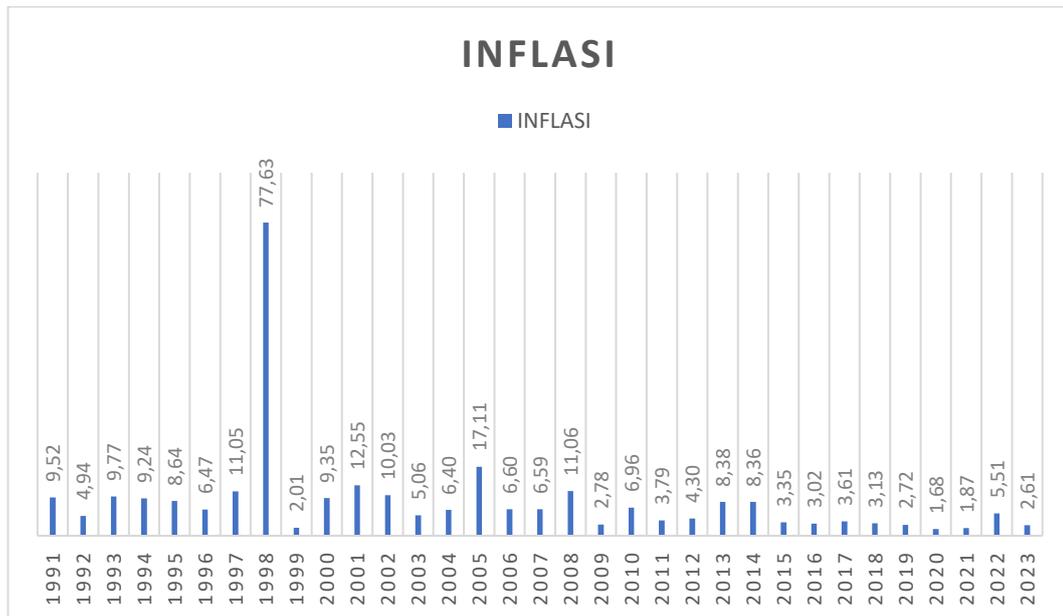


Gambar 1. 3 Nilai Tukar (Rp/US\$) Tahun 1991 – 2023
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) (2024), diolah

Nilai tukar rupiah menunjukkan adanya fluktuasi yang mencerminkan kondisi ekonomi yang berubah-ubah. Pada periode 1991 hingga 1997, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS relatif stabil. Indonesia mengadopsi kebijakan nilai tukar mengambang yang dikelola, di mana pemerintah dan Bank Indonesia secara aktif mengintervensi pasar valuta asing untuk menjaga kestabilan kurs. Pada tahun 1991, nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp 1.992 dan mengalami sedikit fluktuasi selama periode tersebut, dengan kurs pada tahun 1997 berkisar antara Rp 4.650. Stabilitas ini didorong oleh kebijakan ekonomi yang konservatif, pertumbuhan

ekonomi yang baik, inflasi yang terkendali, dan arus investasi asing yang masuk ke Indonesia, yang memberikan kontribusi pada penguatan mata uang. Namun, situasi berubah drastis pada 1997 ketika krisis keuangan Asia melanda. Krisis ini menyebabkan nilai tukar rupiah anjlok secara tajam, dengan depresiasi yang sangat signifikan. Rupiah yang pada awal krisis masih berada di sekitar Rp 2.500, pada puncak krisis pada 1998 merosot hingga lebih dari Rp 8.025. Penyebab utama dari pelemahan rupiah adalah kegagalan dalam kebijakan moneter, penurunan cadangan devisa, dan ketidakstabilan sektor perbankan yang dipicu oleh ketergantungan pada utang luar negeri dan spekulasi mata uang. Krisis ini mengakibatkan ketidakpastian yang besar di pasar valuta asing, menyebabkan kekhawatiran tentang kestabilan ekonomi Indonesia dan memicu aksi jual besar-besaran terhadap rupiah.

Pada tahun 2000, nilai tukar berada di angka Rp 9.595, kemudian mengalami penurunan hingga Rp 8.991, pada tahun 2010 menunjukkan penguatan mata uang lokal. Namun periode 2010 hingga 2015 memperlihatkan peningkatan signifikan dalam nilai tukar hingga Rp 13.795, mencerminkan kondisi ekonomi baik secara global maupun domestik. Pada tahun 2020, nilai tukar meningkat lagi menjadi Rp 14.105, yang bisa disebabkan oleh penyesuaian terhadap kondisi ekonomi global yang tetap kurang stabil. Kemudian pada tahun 2023 nilai tukar meningkat lebih jauh ke Rp 15.416, yang mungkin mencerminkan dampak lanjutan dari pandemi COVID-19 dan upaya pemulihan ekonomi global serta domestik. Ketika nilai tukar mengalami depresiasi atau melemah terhadap mata uang asing dolar AS, hal ini dapat mendorong peningkatan jumlah uang beredar dalam negeri. Disisi lain penguatan nilai tukar rupiah, cenderung mengalami penurunan jumlah uang beredar (Alawiyah et al., 2019).

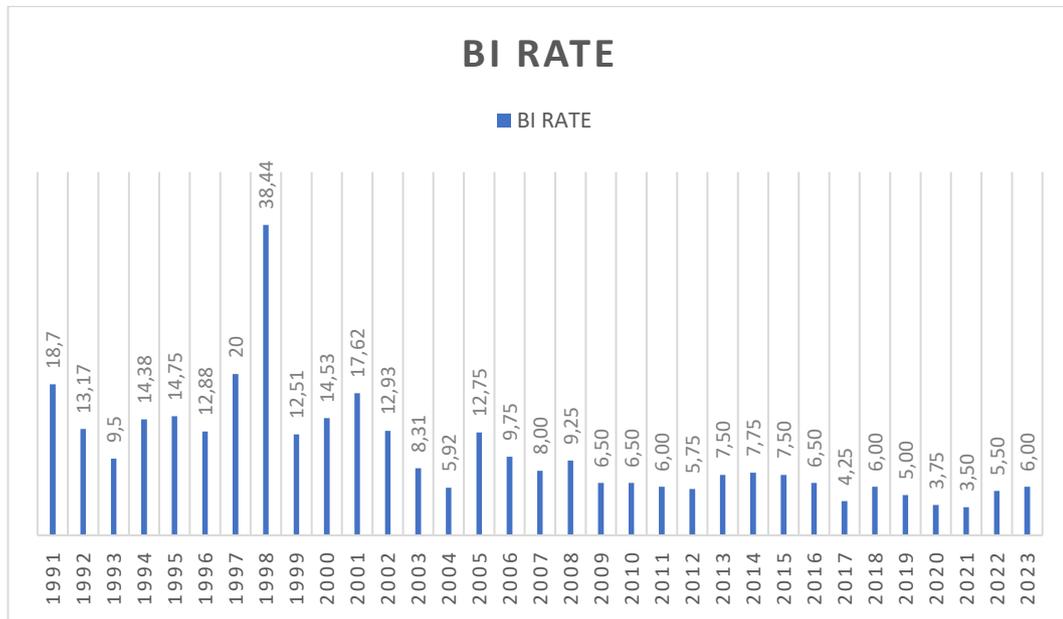


Gambar 1. 4 Inflasi Tahun 1991 – 2023
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) (2024), diolah

Faktor lain yang mempengaruhi jumlah uang beredar adalah inflasi. Salah satu penyebab inflasi sering kali dipicu oleh peredaran jumlah uang yang berlebihan di masyarakat. Ketika uang beredar melebihi batas seharusnya, hal tersebut dapat memicu lonjakan inflasi yang berpotensi melumpuhkan perekonomian (Prasasti & Slamet, 2020). Pada tahun 1991, tingkat inflasi berada di angka 9,52%, yang masih dalam batas wajar untuk negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang sedang berlangsung. Namun, krisis moneter tahun 1998 menyebabkan lonjakan inflasi yang sangat tinggi, mencapai 77,63%. Kenaikan ini dipicu oleh depresiasi tajam nilai tukar rupiah, meningkatnya harga-harga barang impor, serta melemahnya kepercayaan terhadap sektor keuangan domestik.

Pada tahun 2005, inflasi melonjak hingga mencapai angka 17,11%. Namun, memasuki tahun 2010 angka inflasi melandai menjadi 6,96% menunjukkan keberhasilan dalam upaya stabilitas ekonomi. Tahun 2015 menyaksikan penurunan lebih lanjut menjadi 3,35% mencerminkan kebijakan moneter yang efektif dalam mengarahkan ekonomi ke arah yang lebih stabil. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 membawa inflasi ke titik terendah, yaitu 1,68% yang mencerminkan penurunan permintaan konsumen dan harga-harga yang merosot. Menjelang tahun

2023, inflasi kembali meningkat menjadi 2,61% menandakan adanya pemulihan dan penyesuaian harga setelah periode inflasi yang sangat rendah selama pandemi.



Gambar 1. 5 BI RATE Tahun 1991 – 2023
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) (2024), diolah

Di bidang ekonomi, tingkat bunga memegang peranan krusial sebagai imbalan bagi para pemberi pinjaman atas investasi mereka, dan juga sebagai biaya yang ditanggung oleh para peminjam. Namun, fluktuasi tingkat bunga ini memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku keuangan masyarakat. Ketika tingkat suku bunga naik, masyarakat cenderung mengalihkan preferensi mereka untuk menabung di karenakan dengan naiknya bunga mereka berkesempatan mendapatkan hasil yang lumayan dari menabung. Fenomena ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Milton Friedman, yang menyatakan bahwa suku bunga yang tinggi mendorong orang untuk membeli lebih banyak obligasi dan ekuiti, sekaligus mengurangi kecenderungan mereka untuk memegang uang tunai (Al Hafizh, 2022).

Perkembangan tingkat suku bunga acuan (BI Rate) di Indonesia dari tahun 1991 hingga 2023 menunjukkan dinamika yang erat kaitannya dengan kondisi makroekonomi domestik dan global. Pada tahun 1991, tingkat suku bunga acuan masih berada pada level yang relatif tinggi, yakni sekitar 18,7%, seiring dengan

upaya pemerintah menjaga stabilitas inflasi dan menarik investasi portofolio asing. Namun, krisis moneter yang melanda Asia pada tahun 1998 menyebabkan lonjakan drastis pada suku bunga, di mana BI Rate meningkat tajam hingga mencapai 38,44%. Kenaikan ini merupakan respon Bank Indonesia dalam menahan pelemahan nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi yang sangat tinggi saat itu.

Memasuki dekade 2000-an, stabilisasi ekonomi nasional dan penguatan kebijakan moneter mendorong penurunan suku bunga secara bertahap. Pada tahun 2000, rata-rata suku bunga berada di angka 14,53% mencerminkan usaha untuk mengekang inflasi yang mungkin tinggi atau untuk menarik investasi dalam kondisi ekonomi yang belum stabil pasca krisis finansial Asia. Pada tahun 2010, suku bunga turun drastis menjadi 6,5% menunjukkan kebijakan moneter yang lebih longgar untuk mendorong pertumbuhan pasca krisis keuangan global 2008. Pada tahun 2015, suku bunga naik kembali 7,5% yang bisa menunjukkan usaha untuk menstabilkan mata uang dan mengendalikan inflasi di tengah tantangan ekonomi dan domestik. Pada tahun 2020, suku bunga turun drastis lagi menjadi 3,75% sebagai respon terhadap pandemi COVID-19 dengan tujuan merangsang ekonomi melalui biaya pinjaman lebih rendah. Terakhir, pada tahun 2023, suku bunga naik menjadi 6,0% mencerminkan langkah-langkah normalisasi kebijakan moneter untuk mengatasi inflasi yang mungkin meningkat setelah periode stimulus ekonomi yang besar.

Terdapat penelitian lain yang mengatakan variabel BI Rate berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah uang beredar (M2) di Indonesia tahun 2000-2020 (Fajri et al., 2021). Hal ini berarti, setiap kenaikan BI Rate akan menurunkan jumlah uang beredar (M2). Sementara itu, variabel Produk Domestik Bruto (PDB) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah uang beredar (M2) tahun 2000-2020. Artinya, jika Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami peningkatan maka jumlah uang beredar (M2) juga akan mengalami peningkatan. Hasil penelitian lainnya berargumen bahwa tingkat inflasi secara parsial hasilnya Nilai tukar dan Inflasi secara positif mempengaruhi jumlah uang beredar, yang berarti uang beredar dipengaruhi oleh nilai tukar dan tingkat inflasi (Agustina & Permadi, 2023).

Berdasarkan uraian diatas, bahwa ada pengaruh tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar, PDB, maka peneliti mengusulkan penelitian yang berjudul Determinan Jumlah Uang Beredar di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar, PDB dan jumlah uang beredar di Indonesia tahun 1991 sampai 2023?
2. Bagaimana pengaruh tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar dan PDB terhadap jumlah uang beredar di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka Panjang tahun 1991 sampai 2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perkembangan tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar, PDB dan jumlah uang beredar di Indonesia tahun 1991 sampai 2023.
2. Untuk menganalisis pengaruh tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar, dan PDB terhadap jumlah uang beredar di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang tahun 1991 sampai 2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan menambah pemahaman serta informasi bagi kalangan akademis sebagai refrensi dalam penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi pembuat kebijakan. Khususnya Bank Indonesia dan Pemerintah, dalam mengelola dan menstabilkan jumlah uang beredar.